

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SECARA ONLINE DI KOTA
MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SECARA ONLINE DI KOTA
MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

SRIDAYANTI

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11131 16

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di
Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Sridayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11131 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II

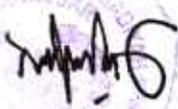

Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si


Dr. Hj. Sudarmi, M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Nasrul Haq, S.Sos., MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0157/FSP/A.4-II/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 bulan Februari tahun 2021



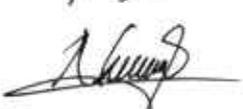
Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si ()
2. Dr. Hj. Sudarmi, M.Si ()
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Sridayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11131 16
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,


Sridayanti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar".

Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Adam Dg. Sija dan Ibu Nurwahida selaku kedua orang tua yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik dalam bantuan moral ataupun materil, serta yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Alyas, MS selaku ketua penguji, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik,

S.Sos, M.Si, Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku penguji.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membagikan ilmunya selama penelitian dalam proses perkuliahan.
6. Bapak M. Rum. Muin, S.E (Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Makassar)
7. Bapak Rehan (Staf Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Makassar)
8. Ibu Normawati, S.E, MM (Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kota Makassar)
9. Rekan-rekan seperjuangan dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan IMM
10. Semua pihak yang sudah ikut membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 Januari 2021

Yang Menyatakan



Sri Dayanti

ABSTRAK

Sridayanti, Anwar Parawangi, Sudarmi, Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat terutama masalah sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun, pada tahun ini sudah dilakukan yang ketujuh kali, dan tahun ini sensus penduduk dilaksanakan secara online diseluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Makassar, salah satu badan yang melaksanakan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, teori yang digunakan Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutarto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan tahapan akhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada bagian sistem registrasi, prosedur kerja, dan penilaian layanan dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar sudah efisien. Adapun kendala dalam penerapan sensus penduduk online adalah sosialisasi yang tidak dilakukan secara berkala. Peneliti menyarankan agar perlunya kesadaran untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar tercapai tujuan sensus penduduk online yang telah diatur sesuai dengan landasan hukum.

Kata kunci : Sistem Administrasi, Sensus Penduduk Online

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Pelaksanaan Sensus Penduduk	7
C. Sistem Administrasi	12
D. Prosedur Kerja	15
E. Penilaian Layanan	18
F. Konsep E-Government	19
G. Layanan untuk memudahkan masyarakat	26
H. Kerangka Pikir	35
I. Fokus Penelitian	36
J. Deskripsi Fokus	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian	38
C. Informan	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Pengabsahan Data	41
F. Teknik Analisis Data	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian	36
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	48
Gambar 3.1 Tata Cara Sensus Online	67
Gambar 4.1 Buku Panduan dan Brosur Sensus Penduduk Online	75
Gambar 5.1 Berkas Pengisian Data Sensus Penduduk Online	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan yang akan di hadapi adalah tingkat partisipasi masyarakat, penduduk Indonesia sebagian mempunyai pemikiran yang pragmatis terhadap beberapa inovasi maupun terobosan yang dilakukan pemerintah. Pemikiran pragmatis yang di maksud berupa pandangan yang akan saya dapat jika berpartisipasi dengan mengisi data kependudukan secara online. Penduduk Indonesia ada yang beberapa cenderung untuk ingin segera merasakan manfaatnya secara langsung, jika dirasa tidak mempunyai manfaat langsung, maka mereka cenderung akan mengabaikannya. Sebenarnya permasalahan ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, ada beberapa dari negara lain di dunia mengalami permasalahan yang sama.

Hal tersebut dipicu akibat ketidakpercayaan dan rasa kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan sebagian pihak. Oleh karena itu, upaya-upaya persuasif terus di upayakan pemerintah khususnya BPS untuk meningkatkan partisipasi di dalam mengisi sensus penduduk secara online.

Di Indonesia keamanan data pribadi dilindungi melalui UU Administrasi kependudukan, UU Informasi Transaksi Elektronik hingga UU keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaan sensus penduduk sendiri di dasari atas UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik. Masalah keamanan data juga tela

Sementara diketahui, pendataan sensus penduduk 2020 secara *door to door* hingga 25 september 2020. Pendaftaran ini ditutup pada tanggal 30 september 2020, di sensus penduduk data dinyatakan telah rampung. Data sementara, total KK yang telah dirampungkan yakni 300.048. Sementara target yang harus dicapai yaitu 336.389 KK. Artinya, 89% warga di kota Makassar telah terdata di BPS.

Sensus Penduduk pada Tahun 2020 menggunakan beberapa Tahapan: Pertama sensus penduduk secara online (sensus penduduk secara online ini berlangsung 15 Februari – 29 Mei 2020. Hal ini dimaksud adalah penduduk melaksanakan sensus secara mandiri melalui <https://sensus.bps.go.id>), Kedua bulan sensus penduduk (pada tahap ini ada beberapa aitem kegiatan dilakukan yaitu: Pemeriksaan daftar penduduk oleh ketua atau pengurus SLS bagi masyarakat yang belum melaksanakan sensus penduduk online, Verifikasi Lapangan (*ground check*) oleh ketua atau pengurus SLS untuk mendata secara *door to door* keberadaan seluruh keluarga dan penduduk yang tinggal di wilayah SLS, dan Pencacahan Mandiri oleh Penduduk dimana pencacahan data dilakukan oleh pemilik rumah secara mandiri dalam hal ini petugas hanya menyerahkan dan mengambil kembali lembar isian), dan Ketiga Pencacahan Sampel (kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada 2021 dimana pengumpulan data dan informasi kependudukan dan perumahan untuk menghasilkan berbagai parameter demografi dan indikator sosial lainnya. Pada tahap ketiga ini untuk memenuhi parameter demografi dan indikator sosial ada 82 pertanyaan yang terisi jawaban).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sensus penduduk yakni dengan judul **“PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR”**. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan suatu program pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar, perlu dilakukan penilaian terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Menurut Sutarto (2000) ada unsur-unsur pelaksanaan yang terdapat baik di dalam organisasi maupun suatu lembaga meliputi: Sistem Registrasi, Prosedur Kerja, dan Penilaian Layanan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengangkat rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan sensus penduduk secara online di Kota Makassar ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengenai kependudukan di Indonesia khususnya di kota Makassar itu sendiri dan dapat di jadikan referensi dari informasi ini untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi pemerintah kota Makassar terkhususnya Badan Pusat Statistik Kota Makassar terkait pelaksanaan sensus penduduk secara online.

penduduk dan informasi lainnya. Dengan melihat kecanggihan teknologi saat ini khususnya teknologi *internet*, yang mempunyai fasilitas website dengan keakuratan baik dari segi waktu, biaya, dan informasi yang dapat diakses kapan saja, dalam hal memanfaatkan penggunaan website dalam aplikasi php, untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam memperoleh informasi lebih *up to date*.

3. Penelitian dari Sari (2016) dengan judul "penyelenggaraan pelayanan pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota samarinda".

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan pembuatan akta kelahiran di kantor dispendukcapil kota samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Dalam pelayanan ini sudah cukup baik, dasar hukum yang jelas dan sah, kesiapan petugas pelaksana pelayanan serta sarana dan prasarana yang memadai, dan pelayanan yang dilakukan secara online untuk memudahkan masyarakat untuk membuat akta kelahiran tanpa harus antri, dan dapat menghemat biaya dan waktu.

B. Pelaksanaan Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan proses keseluruhan dari pada pengumpulan, pengolahan, penilaian, penganalisaan, dan penyajian data kependudukan yang menyangkut antara lain: ciri-ciri demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Prinsip yang digunakan dalam sensus

penduduk adalah menghitung jumlah orang atau penduduk suatu Negara yang pelaksanaan sensus penduduk dilakukan tiap sepuluh tahun sekali yaitu tiap tahun yang berakhiran angka nol (amirbuton, 2010).

Manfaat diadakannya sensus penduduk menurut Wardiyatmoko dan Bintarto yaitu antara lain: Mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin, umur dan banyaknya kesempatan kerja, mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk, mengetahui susunan penduduk menurut mata pencaharian agar diketahui struktur prekonomiannya, mengetahui persebaran penduduk, daerah yang terlalu padat, dan daerah yang masih jarang penduduknya, mengetahui keadaan penduduk suatu kota dan mengetahui akibat perpindahan, dan merencanakan pembangunan bidang kependudukan.

Sensus penduduk bertujuan untuk mencacah seluruh penduduk yang ada di suatu Negara, ini berarti pada hari pelaksanaan sensus, petugas sensus akan mendatangi tiap-tiap rumah tangga untuk mencacah seluruh anggota rumah tangga yang ada. Sehubungan dengan luasnya suatu daerah pencacahan dan pelaksanaan sensus penduduk hanya satu hari yaitu pada hari sensus dimana saat itu dipertanyakan menyangkut jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin, dan umur.

Hal ini merupakan alasan mengapa penelitian tentang perbedaan fertilitas dan mortalitas perlu untuk dilakukan dan menargetkan program tertentu antara lain:

sebagainya. Leibenstein (1974) juga mengemukakan teori fertilitas dari sudut pandang ekonomi. Menurutnya ada berbagai faktor yang berpengaruh dalam penentuan jumlah anak yang dilahirkan hidup pada setiap keluarga.

Hal utama yang perlu diperhatikan adalah upaya seseorang dalam merencanakan jumlah anak yang ingin dimiliki. Perhitungan dalam perencanaan jumlah anak tidak bisa dipisahkan dengan keseimbangan antara kepuasan atau kegunaan yang didapat dengan tambahan biaya akibat tambahan satu orang anak dalam keluarga, baik berupa tambahan psikis maupun tambahan uang. Pertama kegunaan yang diperoleh dari seorang anak sebagai barang konsumsi misalnya sebagai pelipur lara bagi orang tuanya. Kedua kegunaan dari seorang anak sebagai sarana produksi, yakni seorang anak nantinya diharapkan dalam masyarakat dapat berguna menambah pendapatan keluarga. Ketiga kegunaan seorang anak sebagai sumber ketenteraman orang tua pada hari tua kelak.

2. Mortalitas

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk, dua komponen demografi lainnya adalah fertilitas (kelahiran) dan migrasi. Informasi tentang kematian penting bukan hanya di pemerintahan saja melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama pada bidang ekonomi dan kesehatan. Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Misalnya, perencanaan

fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program kebijaksanaan penduduk.

Biasanya berbagai macam ukuran kematian yang dipakai untuk melihat keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Hampir semua kematian merupakan suatu "rate" atau "ratio", dimana Rate merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian seperti; kematian, kelahiran, sakit, dan sebagainya selama periode waktu-waktu tertentu.

★ Sumber data kematian juga dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, (misalnya, sumber data dari sistem registrasi vital, sensus dan survey penduduk, bentuk langsung (direct mortality data), bentuk tidak langsung (indirect mortality data), dan penelitian. Ada berbagai macam angka kematian diantaranya adalah:

- a. Angka Kematian Penyebab Khusus (AKP) adalah jumlah seluruh kematian karena penyebab dalam satu jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut.
- b. Angka Kasus Fatal (AKF) adalah jumlah seluruh kematian karena satu penyebab dalam jangka waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh penderita pada waktu yang sama.
- c. Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah angka kematian bayi usia dibawah usia 28 hari pada jangka waktu (satu tahun) dibagi jumlah kelahiran hidup pada jangka waktu tahun yang sama.

- d. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan nifas dalam satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama.
- e. Tingkat Kematian Kasar (Crude Death Rate) adalah banyaknya kematian pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun.
- f. Tingkat Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate) adalah jumlah kematian penduduk pada tahun tertentu berdasarkan klasifikasi umur tertentu.
- g. Tingkat Kematian Bayi (TKB) adalah jumlah kematian bayi pada tahun tertentu, dan jumlah lahir hidup pada tahun tertentu.

C. Sistem Administrasi

Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem yaitu menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sedangkan sistem yang lebih menekankan pada elemen mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen, komponen, dan subsistem yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sutabri (2012:6) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Menurut Pratama (2014:7) Sistem adalah

sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan unsur yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan.

Administrasi adalah suatu kegiatan yang melibatkan aturan mencakup pekerjaan yang sistematis dan terarah Menurut (Sulianta, 2008). Sedangkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2006).

Hakikat administrasi kependudukan adalah pengakuan Negara terhadap hak publik domisili, pindah-datang dan hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatnya kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

4. Mendukung peristiwa kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta local, dan
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Margo Yuwono selaku Deputy Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) sensus penduduk 2020 mengatakan ada dua metode yang dilakukan dalam sensus penduduk yaitu antara lain:

a. Metode Online akan dimulai pada Sabtu 15 Februari 2020 dan berlangsung hingga 31 Maret 2020. Dalam Survei Online Sistem Administrasinya yaitu:

- 1) Untuk mendaftar sensus penduduk warga bisa mengakses di laman www.sensus.bps.go.id.
- 2) Membuat *password* sendiri terus warga harus mengikuti seluruh pertanyaan di laman dan menjawab sesuai kondisi tiap warga.
- 3) Masyarakat bisa memasukkan data individu dan keluarganya di laman tersebut.
- 4) Terakhir warga harus menyiapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akta Nikah, Surat Cerai dan Sebagainya sesuai status administrasi kependudukan saat ini.

b. Metode Offline akan dimulai pada bulan Juli sampai 30 September 2020. Dalam Survei Offline Sistem Administrasinya yaitu:

- 1) Petugas sensus BPS akan mendatangi rumah-rumah warga secara *door to door* untuk membantu warga yang kemungkinan NIK dan KK tidak tersedia di database kependudukan yang membuat warga belum bisa

mengisi data secara online.

- 2) Petugas sensus BPS datang ke rumah warga dan melakukan wawancara seputar data kependudukan.

D. Prosedur Kerja

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian lebih lengkap prosedur adalah aturan kerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Prosedur juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan dan berurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2010:23) bahwa, Prosedur adalah serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan Menurut Mulyadi (2013:5) bahwa, Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:5) menyatakan terdapat beberapa karakteristik prosedur, di antaranya sebagai berikut:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi adalah suatu organisasi dapat mencapai tujuannya karena melibatkan beberapa orang dalam

2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Mekanisme pengumpulan data dan zona sensus penduduk wawancara diubah mekanismenya dalam tiga zona sebagai berikut:

1. Zona 1 (Drop off pick up/DOPU)

Ada 227 kabupaten/kota yang termasuk dalam zona ini, yaitu melalui mekanisme drop-off pick-up atau DOPU Artinya adalah petugas sensus akan membagikan kuesiner kepada masyarakat dan nanti akan mengambil kembali kuesiner yang sudah diisi secara mandiri oleh masyarakat.

2. Zona 2 (Non DOPU)

Ada 246 kabupaten/kota yang termasuk dalam zona ini yang menggunakan mekanisme pengumpulan data hanya akan dilaksanakan tahap pemeriksaan data penduduk dan tahap verifikasi lapangan tanpa wawancara yang detail.

3. Zona 3 (Wawancara)

Zona 3 khusus diperuntukkan untuk kabupaten/kota di Makassar, di zona tersebut petugas sensus akan tetap melakukan wawancara dengan sistem baru. Hal ini di informasikan kepada masyarakat untuk menerima

petugas dan memberikan informasi detail.

E. Penilaian Layanan

Penilaian memiliki arti yang sama dengan evaluasi. Menurut Kelly dan Melograno yang dikutip oleh Nana Sudjana (2001:3) evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses menginterpretasi data yang diperoleh dari assesmen yang berkaitan dengan peserta didik untuk membuat keputusan mengenai prestasi dan program pembelajaran yang akan diikuti peserta didik. Nana Sudjana (2001:3) mendeskripsikan penilaian sebagai proses memberikan atau menentukan nilai pada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

Pendapat lain di ungkapkan oleh Asnawi Zainal dan Nochi Nasution (2001:16) yang menyatakan bahwa penilaian adalah pemberian nilai pada kualitas kemudian Cronbach dan Stufflebeam yang dikutip Suharsimi Arikunto (2012:3) mendeskripsikan proses evaluasi atau penilaian tidak sekedar untuk mengukur sejauh mana tujuan itu tercapai, tetapi digunakan juga untuk mengambil keputusan.

Pelayanan atau layanan yang baik itu pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pelayanan yang optimal yang akhirnya juga dapat mampu meningkatkan image organisasi sehingga citra organisasi yang baik, maka segala bentuk yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap baik pula. Menurut Kasmir (2006:3) faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia, artinya peranan manusia atau karyawan yang melayani masyarakat merupakan faktor utama karena hanya dengan manusia pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.

Menurut Atep Adya Barata (2003:37) Kualitas pelayanan terbagi menjadi dua bagian yaitu pelayanan internal dan eksternal. Dimana kedua bagian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan internal atau interaksi pegawai organisasi adalah pola manajemen umum organisasi, penyediaan fasilitas pendukung, pengembangan sumber daya manusia, iklim kerja dan keselarasan hubungan kerja, serta pola insentif.
2. Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan eksternal atau pelanggan eksternal adalah pola layanan dan tata cara penyediaan layanan, pola layanan distribusi jasa, pola layanan penjualan jasa, dan pola layanan dalam penyampaian jasa.

F. Konsep E-Government

1. Pengertian E-Government

E-government adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kekuatan teknologi digital, dimana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, keuangan, pengendalian dan pengawasan sumber daya yang dikelola oleh organisasi yang bersangkutan, retribusi, pajak, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. Menurut Mustopadidjaja dalam Yuwelsoni (2016) E-government adalah pemanfaatan teknologi yang berdasarkan pada WEB komunikasi internet, dan dalam beberapa kasus tertentu menggunakan aplikasi interkoneksi dalam memfasilitasi komunikasi, akses ke dan atau

pemberian layanan, dunia usaha, pencari kerja, informasi pemerintah kepada penduduk serta pemerintah lain, baik instansional ataupun antar negara.

E-government menurut Bank Dunia dalam Adelia (2016), E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dengan instansi pemerintah seperti Wide Area Network, Internet, dan Mobile Computing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Konsep lainnya adalah yang di kemukakan oleh Clay G. Weslart (2007) dalam website, yaitu menurutnya E-government adalah penggunaan informasi teknologi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien, penekanan biaya yang efektif dan fasilitas pelayanan terhadap masyarakat umum dan menjadikan pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Menurut Mark dalam Irawan (2018) E-government secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Menurut Yong (2003) E-government merupakan upaya penggunaan teknologi dalam menjadikan organisasi publik agar dapat melakukan penataan ulang, perbaikan struktur serta proses administrasi, jaringan dan jangkauan layanan publik.

Menurut Indrajit dalam Rianto (2012) E-Government merupakan suatu sistem interaksi baru yang diterapkan oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat dan kalangan lainnya yang memiliki

kepentingan, dengan menggunakan teknologi informasi terutama internet yang bertujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 E-Government merupakan penggunaan teknologi berbasis elektronik pada sistem pemerintahan agar kualitas layanan publik menjadi efektif, efisien dan interaktif sehingga dapat mengalami peningkatan.

Menurut E-Government Fahih Suaedi, Bintoro Wardianto (2010:54) E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Sedangkan, Menurut Samodra Wibawa (2009:114) mendefinisikan E-Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id).

Tanpa mengecilkkan arti dan beragam definisi yang telah disampaikan diatas setidaknya-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi Electronic Government (E-Government), yaitu: Pertama, merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder). Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. Ketiga, tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep E-

Government bagi suatu negara, antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya* (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapisejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada; serta
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Konsep E-Government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini

diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan aman dan nyaman, yang ke semuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan E-Government adalah salah satu caranya. Selain itu tujuan penerapan E-Government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance).

Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan E-Government akan menghasilkan 4 (empat) hubungan bentuk baru yaitu G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E, masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Government to Citizens (G-to-C), merupakan aplikasi E-Government yang dibangun untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari

Kedua, Government to Business (G-to-B), merupakan salah satu tugas utama dari sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang

dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

Ketiga, *Government to Governments*, Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerja sama antar negara dan kerja sama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan.

Keempat, *Government to Employees (G-to-E)*, aplikasi *E-Government* juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Dengan menyadari adanya bermacam-macam tipe aplikasi tersebut, maka terlihat fungsi strategis dari berbagai aplikasi *E-Government* yang dikembangkan oleh pemerintah. Keberadaannya tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat industri kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara-

satu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Kualitas tidak dapat dipisahkan dari produk, jasa atau pelayanan. Kualitas pelayanan menurut Samparna (Hardiyansyah, 2011 : 35) dikemukakan bahwa kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam memberikan layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dimensi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengukur kualitas pelayanan publik menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (dalam Harbani Pasalong, 2013 : 135) telah diuraikan sebagai berikut:

- a. Tangibles adalah kualitas pelayanan yang berupa tampilan fisik
- b. Reliability adalah kemampuan dan keandalan untuk menyediakan jasa pelayanan yang terpercaya dan akurat.
- c. Responsiveness adalah kesanggupan karyawan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
- d. Assurance (jaminan) adalah kemampuan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan konsumen
- e. Empaty adalah sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis

fungsi utama dalam teori ilmu administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.

Secara etimologis, pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah,

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan kepuasan kepada penerima pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik menurut Bab 1 Pasal 1 ayat 2 UU No. 25 Tahun 2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan baik di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional. Berikut adalah beberapa azas-azas dalam pelayanan publik:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisiona

- d. Partisipasi
 - e. Kesamaan Hak
 - f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
4. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan tersebut, bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain:

- a. Pelayanan Administratif Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan Barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
 - b. Pelayanan Jasa Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggara transportasi, pos dan sebagainya.
5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai regulator (rule government) harus mengubah pola pikir dan kinerja penyelenggaranya, disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi

daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya *good governance*, dalam menjalankan pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat, mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, keadilan dan kepastian hukum.

Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik perlu ada upaya untuk memahami sikap dan perubahan kepentingan publik sendiri. Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum. Pada prinsipnya, setiap pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pemerintah sudah seharusnya menganut paradigma berorientasi pada kepentingan masyarakat (*customer driven*) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigme tersebut secara sistematis, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara serta untuk mensejahterakan masyarakat dari suatu negara kesejahteraan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari *empowering* yang dialami oleh

masyarakat. Hal ini menjadikan masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajiban, semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah dan semakin kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Dalam kondisi masyarakat yang digambarkan diatas, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Pemerintah juga dituntut untuk menerapkan prinsip equity, artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki

posisi kuat sebagai regulator (pembuat aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan berkepentingan.

Unsur kedua adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap saling menguntungkan.

Unsur ketiga adalah kepuasan pelanggan menerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.

Peningkatan pelayanan publik tidak akan sejalan dengan tujuan apabila tidak ikut campur tangan partisipasi masyarakat. Menurut Marschall tujuan dari partisipasi publik adalah pada dasarnya untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan sebagaimana juga membantu dalam pelaksanaan pelayanan. Oleh karenanya penyelenggara pelayanan publik haruslah mendapat partisipasi



Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penelitian

I. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian berangkat dari rumusan masalah yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang diambil dari rumusan masalah adalah Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar dalam sensus penduduk berbasis online.

J. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus penelitian itu yakni:

1. Sistem Registrasi merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah atau badan pusat statistik untuk dapat mendata jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk kota Makassar.

2. Prosedur Kerja merupakan proses rangkaian tata kerja yang saling berhubungan dan mengikat dengan peraturan yang dapat menunjukkan adanya suatu tahapan atau proses yang dikerjakan dalam menyelesaikan suatu tujuan pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar.
3. Penilaian Layanan adalah pada penelitian ini maka penilaian layanan yang dihasilkan oleh proses ini adalah pencapaian realisasi dari tujuan kebijakan yang diterapkan dalam hal pelaksanaan sensus penduduk secara online pada Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
4. Faktor pendukung adalah keseluruhan mekanisme kegiatan yang dapat membantu untuk mencapai tujuan pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar.
5. Faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat berjalannya pencapaian tujuan pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua (2) bulan di kantor badan pusat statistik kota Makassar. Penentuan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa kantor badan pusat statistik kota Makassar merupakan instansi pemerintah melakukan sensus penduduk secara langsung maupun tidak langsung (online).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan penulis sebagai mana yang dijelaskan dalam Sugiyono (2017), seabagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif untuk memberikan gambaran secara detail mengenai fenomena yang terjadi dilapangan dan memberikan penjelasan secara kongkrit tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari pada objek yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenology, karna melakukan pengumpulan data dengan melalui wawancara disertai dengan data tertulis di kantor dinas pelayanan sensus penduduk supaya tujuan penelitian bisa akurat apa yang terjadi dilapangan dengan dokumen-dokumen kemudian dilakukan observasi untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya atau kejadian secara nyata yang

C. Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah Badan Pusat Statistik di Kota Makassar.

Tabel 1.1 Informan penelitian

NO.	INFORMAN	INISIAL	JABATAN
1.	M. Rum Muin, S.E	MRM	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Makassar
2.	Rehan	R	Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kota Makassar
3.	Normawati, S.E, M.M	N	Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kota Makassar
4.	Drs. Muhdar, M.M	M	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kota Makassar
5.	Sudirman, S.E, M.Si	S	Kepala Seksi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kota

			Makassar
6.	Sari	S	Masyarakat
7.	Gau Halim	GH	Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data primer dan data sekunder penelitian menggunakan beberapa bentuk pengumpulan data sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2017) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Studi perpustakaan yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
2. Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan penyeleksian data secara langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.

- c. Dokumentasi

menghubungkan semua data baik data primer maupun data sekunder, guna membagi konsep bermakna. Penyajian data bertujuan untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi deskriptif.

3. Penarikan kesimpulan

Sejak awal penelitian penulis mengumpulkan data dan harus mengerti apa arti hal-hal yang telah ditemui dan didapatkan di lapangan dan mencatat sebab-akibat yang telah terjadi serta berbagai proporsi sehingga dilakukan penarikan kesimpulan dan dipertanggungjawabkan. Maka selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah penafsiran terhadap kesimpulan.

Tabel 2.1 Penduduk Wilayah Kota Makassar menurut jumlah Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mariso	29,856	29,436	59,292
2.	Mamajang	29,884	31,123	61,007
3.	Tamalate	96,516	97,977	194,493
4.	Rappocini	79,560	84,903	164,563
5.	Makassar	42,048	42,710	84,758
6.	Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
7.	Wajo	15,164	15,769	30,933
8.	Bontoala	27,579	28,957	56,536
9.	Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
10.	Tallo	69,739	69,428	139,167
11.	Panakkukang	73,114	74,669	147,783
12.	Manggala	69,541	69,118	138,659
13.	Biringkanaya	100,978	101,542	202,520
14.	Tamalanrea	54,988	57,182	112,170
Total		727,314	742,287	1,469,601

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2016

2. Gambaran Umum Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintahan Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik merupakan Biro Pusat Statistik yang

dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut di terapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 tahun 1997, yaitu:

- a. Jenis statistik menurut tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan badan pusat statistik, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan badan pusat statistik.
- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh badan pusat statistik diumumkan dalam berita resmi statistic (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.
- c. Sistem statistic nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- d. Dibentuknya forum masyarakat statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada badan pusat statistik.

Berdasarkan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, maka

peranan yang harus dijalankan oleh badan pusat statistik adalah antara lain:

- 1) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder.
- 2) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- 3) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistic, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- 4) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan Negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

3. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kota Makassar

a. VISI

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa badan pusat statistik berperan dalam penyediaan data statistic nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya,

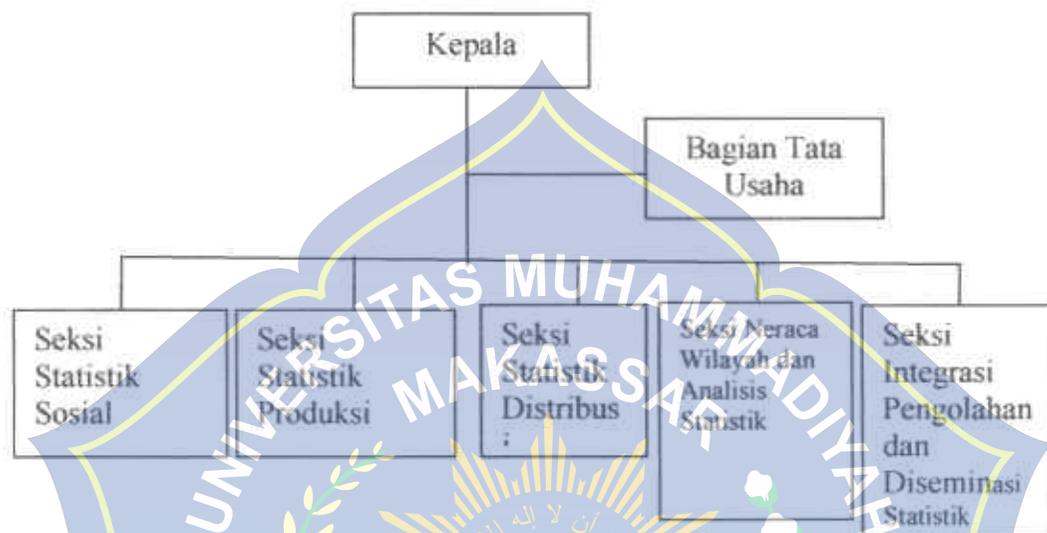
dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi badan pusat statistik sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting karena, memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga ditingkat dunia. Dengan visi tersebut juga semakin menguatkan peran badan pusat statistik sebagai Pembina data statistik.

b. MISI

Misi Badan Pusat Statistik dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan badan pusat statistik, visi BPS serta melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (peningkatan kualitas manusia di Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- 2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinamungan.
- 3) Menwujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

4. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kota Makassar



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kota Makassar.

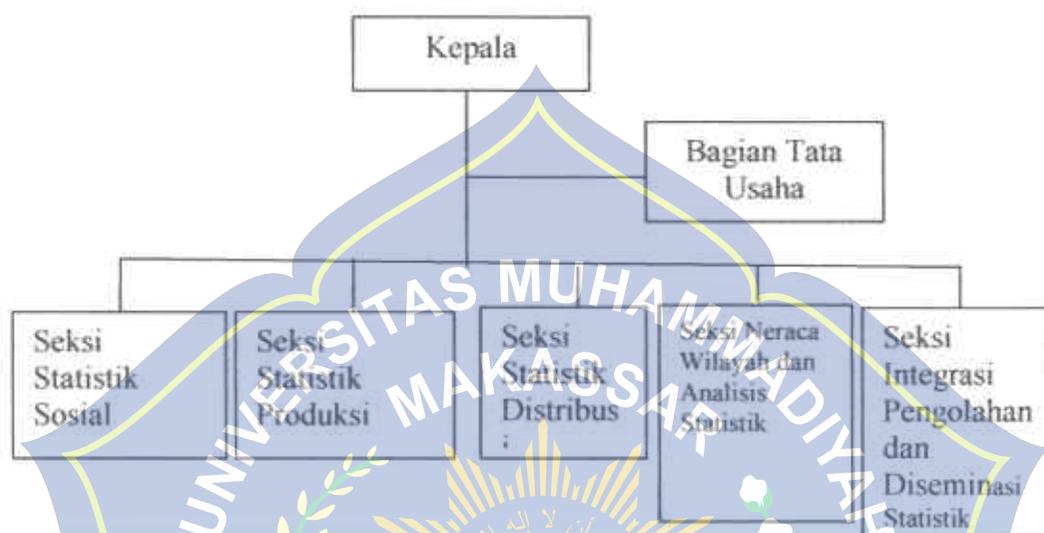
Berdasarkan struktur organisasi Badan Pusat Statistik diatas maka tugas-pokok fungsi masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pusat Statistik

Kepala Badan Pusat Statistik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sensus mandiri diwilayah tugasnya secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan sensus mandiri 2020 dengan Bupati/Walikota dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan teknis lapangan sensus mandiri 2020 di tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan sensus mandiri 2020 di tingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus mandiri.

4. Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kota Makassar



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pusat Statistik diatas maka tugas-pokok fungsi masing-masing sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pusat Statistik

Kepala Badan Pusat Statistik bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan sensus mandiri diwilayah tugasnya secara umum memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan sensus mandiri 2020 dengan Bupati/Walikota dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan teknis lapangan sensus mandiri 2020 di tingkat Kabupaten/Kota.
- 3) Mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan sensus mandiri 2020 di tingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus mandiri.

- 1) Berkoordinasi dengan Subbag tata usaha badan pusat statistik kabupaten/kota dalam mendistribusikan bahan peraga untuk ketua/pengurus SLS dan pengurus apartemen.
- 2) Membuat alokasi dan jadwal pengawasan sensus mandiri.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus mandiri.
- 4) Bersama seksi IPDS badan pusat statistik kabupaten/kota membuat pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus mandiri.
- 5) Membantu kepala badan pusat statistik kabupaten/kota dalam pelaksanaan sensus mandiri di kabupaten/kota dan mengawasi seluruh kegiatan lapangan.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan badan pusat statistik kabupaten/kota terkait kegiatan sensus penduduk 2020.

d. Seksi Statistik Produksi

Seksi statistik produksi badan pusat statistik kabupaten/kota tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi statistik produksi.
- 2) Membantu kepala badan pusat statistik kabupaten/kota dalam menyiapkan program pelatihan tugas lapangan.
- 3) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik produksi.
- 4) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik produksi

e. Seksi Statistik Distribusi

Seksi statistik distribusi badan pusat statistik kabupaten/kota tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi statistik distribusi.
- 2) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan statistik distribusi.
- 3) Membantu badan pusat statistik kabupaten/kota dalam menyiapkan program pelatihan petugas lapangan.
- 4) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- 5) Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen hasil pengumpulan data statistik distribusi.

f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Seksi neraca wilayah dan analisis statistik badan pusat statistik kabupaten/kota tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi neraca wilayah dan analisis statistik.
- 2) Mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan neraca wilayah dan analisis statistik.
- 3) Melakukan pembagian dokumen dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan lapangan.
- 4) Melakukan penyiapan bahan laporan akuntabilitas seksi neraca wilayah dan analisis statistik.

5) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Seksi integrasi pengolahan dan diseminasi statistik badan pusat statistik kabupaten/kota tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengoordinir implementasi pelaksanaan sensus mandiri (perpanjangan tangan dari seksi statistik sosial jika terkendala dalam operasional aplikasi sensus mandiri).
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus mandiri.
- 3) Bersama seksi statistik sosial badan pusat statistik kabupaten/kota membuat pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus mandiri.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan badan pusat statistik kabupaten/kota terkait kegiatan sensus penduduk 2020.

B. Hasil Penelitian

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar, diperoleh hasil wawancara mengenai Pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar berdasarkanteori yang dikemukakan oleh Sutarto :

1. Sistem Registrasi

Sistem registrasi yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini adalah pelaksanaan sensus penduduk secara online kota Makassar. Sistem registrasi dibutuhkan untuk untuk mengetahui administrasi dalam pendataan sensus penduduk secara online di Kota

Makassar.

Kota Makassar merupakan wilayah yang memiliki masyarakat yang banyak sekitar 1,4 juta penduduk kota Makassar dan terdiri dari 14 kecamatan. Yang mayoritas penduduknya kebanyakan kurang mampu dan hanya beberapa penduduknya yang mayoritas orang mampu, dan masalah pendidikan di kota Makassar itu sendiri masih banyak yang kurang mampu untuk bisa masuk dan melanjutkan pendidikan.

Berikut tanggapan *Informan* dari pihak pemerintah Badan Pusat Statistik terhadap pelaksanaan sensus penduduk secara online di Kota Makassar:

“Sensus Penduduk secara Online di laksanakan tahun ini baru pertama kali dilaksanakan secara online yang dulunya offline masalah-masalah yang dihadapi dimana jumlah penduduk antara hasil jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh dukcapil itu selalu berbeda jumlahnya karena metodenya yang berbeda jadi kalau sensus penduduk itu kami mencacah *door to door* di dalam rumah tersebut ada siapa saja kemudian kalau dari dukcapil tergantung dari kita sendiri melaporkan atau tidak jadi ada yang berbeda dari data dukcapil dan badan pusat statistik itu sendiri sehingga kami mengambil data dari dukcapil sebagai data dasar untuk sensus penduduk online kemudian mengakses dengan menggunakan NIK dan Nomor KK. Kemudian dari sensus online ini kita tidak terlalu mengeluarkan biaya untuk menugaskan petugas untuk mendata dari sensus penduduk online ini bisa masyarakat sendiri yang melakukannya dimanapun dan kapanpun menggunakan android mereka masing-masing.”

(Hasil wawancara MRM, Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik, Senin 27 November 2020, di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Berdasarkan tanggapan informan diatas terkait sensus penduduk secara online di kota Makassar bisa dikatakan terbilang sangat mudah bagi masyarakat karna hanya menggunakan elektronik masyarakat masing-

masing yang seperti menggunakan android atau haenphone mereka dimanapun dan kapanpun selama proses pendataan masih dilaksanakan oleh badan pusat statistik.

Sensus penduduk online Wilayah Kota Makassar merupakan pendataan penduduk kebijakan baru dari pemerintah yang dimana dulunya dilakukan secara offline selama 6 kali dalam setiap 10 tahun. yang dimana di kota Makassar itu sendiri terdiri dari 15 kecamatan yang harus mengikuti sensus penduduk online tersebut, ditahun 2020 pertama kali pemerintah melakukan sensus penduduk secara online.

“Sensus Penduduk secara Online melakukan beberapa uji coba menggunakan web karena sistem registrasinya memang berbasis web bisa di akses melalui android kemudian tahapan pelaksanaannya kami menghubungi dukcapil untuk bekerjasama dalam sensus online sehingga kita mengambil keputusan dari dukcapil itu sebagai dasar awal dalam sistem registrasi sehingga penduduk bisa mendaftar dengan menggunakan nomor KK dan nomor NIK untuk bisa mengisi atau merubah data keluarga masing-masing setelah itu kami melakukan uji coba sekitar bulan Januari sampai Februari kemudian pelaksanaannya itu dibuka mulai pada tanggal 15 Februari 2020 itu dibuka secara nasional bisa melakukan pendaftan sensus online.”

(Hasil wawancara R, Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik, Selasa 28 November 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf di badan pusat statistik kota Makassar mengenai sensus penduduk secara online yang pelaksanaannya pada tanggal 15 Februari 2020.

“sensus penduduk bisa dikatakan pendataan penduduk terbaru yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik itu sendiri dibanding sensus penduduk 10 tahun yang lalu secara offline karena tahun ini kami melakukan sensus penduduk secara online dengan tujuan menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik

penduduk Indonesia.”

(Hasil wawancara R, Staf Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik, Selasa 28 November 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan badan pusat statistik di Kota Makassar yang dulu dilaksanakan secara offline sekarang di tahun 2020 dilaksanakan secara online oleh badan pusat statistik kota Makassar.

“Pendaftaran dari sensus penduduk online itu dari 15 kecamatan ada beberapa kecamatan yang pendataannya tertinggi yaitu kecamatan Biringkanaya, kecamatan yang pendataannya berada ditengah-tengah itu kecamatan Rapocini, Tamalate, dan Tamalanrea, sedangkan kecamatan yang pendataannya rendah ada di kecamatan Wajo, Ujung Pandang, dan 9 kecamatan lainnya.”

(Hasil wawancara MRM, Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi statistik, Senin 27 November 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Pendaftaran yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat masih dibidang cukup kurang partisipan dari masyarakat tentang sensus penduduk online ini karena hanya beberapa kecamatan yang terbilang tinggi dan masih banyak kecamatan yang terbilang rendah pendaftaran masyarakatnya.

2. Prosedur Kerja

Prosedur kerja yakni merupakan proses pengelolaan sistem registrasi menjadi prosedur kerja. Pada data kependudukan Data kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk, dan proses penyusunan langkah-langkah kedepan yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online pada tahun 2020 ini, yaitu :

“Agar masyarakat tahu tentang sensus penduduk online ini kami keliling dinas ke dinas dan wali kota Makassar untuk menyampaikan hal tersebut kepada kelurahan, RW, RT, atau SLS terdekat. Kemudian kami juga membantu mengisi sensus online ini ke masyarakat yang sudah tua ataupun yang tidak mengerti kami harus memantau dari segi pengisian, dan memahamkan masyarakat tentang keamanan data penduduk melalui UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik.”

(Hasil wawancara N, Kepala Bagian Tata Usaha, Selasa 01 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Peraturan tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online diatur dalam sebuah peraturan penanggulangan bencana diatur dalam sebuah Peraturan di bentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut di terapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online badan pusat. Dalam mengatasi keamanan data dari sensus penduduk online:

“Dalam mengatasi keamanan data bukan hanya badan pusat statistik tapi yang terlibat dalam keamanan data itu sendiri ada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah, dan Ketua SLS.”

(Hasil wawancara S, Kepala Seksi Statistik Produksi, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Tantangan terbesar badan pusat statistik kota Makassar dalam mengatasi kelebihan dan kekurangan dari sensus penduduk online ini baik yang dilaksanakan sekarang maupun sensus penduduk yang akan dilaksanakan kedepannya.

“Badan Pusat Statistik membentuk tim dari tim tersebut disebar ke setiap kecamatan yang ada di kota Makassar dan lurah dikumpulkan untuk menyampaikan hal ini kepada RW dan RT untuk disampaikan ke masyarakat, dan memantau terus peningkatan pendataanya, membagikan brosur, dan menempel spanduk di setiap wilayah kota Makassar.”

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dengan adanya upaya sosialisasi dari badan pusat statistik dalam pelaksanaan sensus penduduk online ini yang masih dalam proses pendataan diharapkan berjalan dengan lancar, karena jika tidak berjalan dengan sesuai harapan maka akan berdampak tidak baik bagi Indonesia itu sendiri karna tidak dapat mencapai tujuannya.

3. Penilaian Layanan

Penilaian layanan merupakan hasil pekerjaan atau dari proses pengumpulan data. Pada penelitian ini maka penilaian layanan yang dihasilkan oleh proses ini adalah pencapaian realisasi dari target kebijakan yang diterapkan pelaksanaan sensus penduduk secara online pada badan pusat statistik kota Makassar, seperti hasil wawancara yang dilakukan :

“Kami kurang mengetahui mengetahui bahwa sensus penduduk yang dulu dilaksanakan secara offline sekarang dilaksanakan secara online tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan ini, kami hanya mengetahuinya pada saat pak RT mendatangi kami dan mengatakan bahwa pada tahun ini sensus penduduk dilaksanakan secara online dari pak Rt kami yang memberi tahu langkah-langkah pendaftaran sensus penduduk online tersebut.”

(Hasil wawancara GH, Masyarakat, Senin 07 Desember 2020, di Bontojai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa persiapan menghadapi bencana perlu dilakukan pemerintah bukan hanya tindakan yang dilakukan pada saat bencana sudah terjadi

“Pelayanan dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online ini cukup baik karena lebih efisien.”

(Hasil wawancara S Masyarakat, Senin 07 Desember 2020 di Bontojai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)

Kerja sama yang nanti dilakukan Masyarakat dengan Badan pusat Statistik kota Makassar diharapkan mampu menyelesaikan pelaksanaan sensus penduduk secara online.

“Menurut kami mengenai sensus penduduk online kedepannya itu lebih diperluas lagi sosialisasi mengenai pelaksanaannya agar masyarakat seperti kami bisa lebih awal mengetahui tentang kebijakan pemerintah, sensus penduduk secara online ini lebih ditingkatkan lagi dan terus di update perkembangannya.”

(Hasil Wawancara S, Masyarakat, Senin 07 Desember 2020, di Bontojai Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di atas terkait pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar, masyarakat berharap supaya pemerintah bisa melakukan sosialisasi luas mengenai kebijakan ini agar masyarakat awam bisa bekerja sama dalam pelaksanaan sensus penduduk ini, dan bisa melakukan sensus secara mandiri dimanapun dan kapanpun selama pelaksanaan sensus penduduk online ini masih dilaksanakan supaya dapat mewujudkan data kependudukan di wilayah Indonesia khususnya di kota Makassar .

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar

Dari penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sensus penduduk secara online diantaranya:

a. Faktor pendukung

1. Elektronik Handphone

Untuk mencapai keberhasilan suatu pelaksanaan sensus penduduk secara online perlu menyediakan sarana dan prasarana seperti Elektronik Handphone dalam melakukan sistem registrasi untuk mencapai tujuan pendataan. Wawancara yang dilakukan:

“Metode Online akan dimulai pada Sabtu 15 Februari 2020 dan berlangsung hingga 31 Maret 2020. Dalam Survei Online Sistem Administrasinya yaitu: Untuk mendaftar sensus penduduk warga bisa mengakses di laman www.sensus.bps.go.id. Membuat *password* sendiri terus warga harus mengikuti seluruh pertanyaan di laman dan menjawab sesuai kondisi tiap warga. Masyarakat bisa memasukkan data individu dan keluarganya di laman tersebut. Terakhir warga harus menyiapkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, Akta Nikah, Surat Cerai dan Sebagainya sesuai status administrasi kependudukan saat ini, dan Kelebihannya sudah praktis untuk badan pusat statistik itu sendiri tidak perlu secara offline menghemat biaya dan memudahkan masyarakat juga untuk mendata diri mereka masing-masing.”

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana Pelaksanaan sensus penduduk secara online sudah

bagus, kerana dengan secara online sudah efisien untuk dapat mendaftarkan diri mereka masing-masing kapanpun dan dimanapun terhadap setiap masyarakat dan hanya menggunakan NIK dan KK sebagai persyaratan dalam pendaftaran sensus penduduk online.

2. Komputer

Untuk mencapai keberhasilan suatu pelaksanaan sensus penduduk secara online perlu menyediakan sarana dan prasarana seperti Komputer dalam melakukan Prosedur Kerja untuk mencapai tujuan pendataan. Wawancara yang dilakukan:

“Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara: Pertama, pendataan penduduk mandiri melalui *website* atau disebut *Computer Aided Web Interviewing (CAWI)* Cara ini mengharuskan setiap penduduk untuk mengisi datanya sendiri tanpa adanya proses wawancara tatap muka oleh petugas kemudian penduduk mengisi kuesioner sensus melalui alamat *website* yang telah ditentukan. Kedua, metode pencacahan dengan kuesioner elektronik atau disebut *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* pada cara ini, proses wawancara tatap muka tetap dilakukan namun data hasil wawancara langsung di-*input* ke media elektronik yang telah disiapkan dengan cara ini proses entri data hasil sensus dilakukan bersamaan dengan proses pendataan. Ketiga, metode pencacahan dengan kuesioner kertas atau *Paper And Pencil Interviewing (PAPI)* cara ini merupakan cara yang lazim dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya petugas melakukan wawancara kepada responden dan mengisi jawaban responden pada kuesioner kertas yang telah disiapkan, dan selanjutnya kuesioner tersebut akan dientri di pusat pengolahan.”

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana Pelaksanaan sensus penduduk secara online sudah

bagus, kerana dengan secara online sudah efisien untuk dapat mengumpulkan data masyarakat yang telah mendaftar secara online langsung dapat dilihat dan di simpan.

3. Kedisiplinan Pegawai

Untuk mencapai keberhasilan suatu pelaksanaan sensus penduduk secara online perlu menyediakan sarana dan prasarana seperti kedisiplinan pegawai dalam melakukan Penilaian Layanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan pendataan. Wawancara yang dilakukan:

"Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh pegawai atau tim yang ditempatkan di lokasi tersebut harus disiplin dalam hal waktu yang tepat dalam mengunjungi atau *door to door* dan berpakaian rapi dengan menggunakan identitas badan pusat statistik untuk menjelaskan maksud dan tujuannya memberikan pengertian yang jelas mengenai sensus penduduk secara online dan dapat mengrahasiakan data pendataan ini mengharuskan setiap penduduk untuk mengisi datanya sendiri adanya proses wawancara tatap muka tetap dilakukan namun data hasil wawancara langsung di-*input* ke media elektronik yang telah disiapkan dengan cara ini proses entri data hasil sensus dilakukan bersamaan dengan proses pendataan dan cara yang lazim dilakukan pada sensus-sensus sebelumnya petugas melakukan wawancara kepada responden dan mengisi jawaban responden pada kuesioner kertas yang telah disiapkan, dan selanjutnya kuesioner tersebut akan dientri di pusat pengolahan."

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dari wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana Pelaksanaan sensus penduduk secara online sudah bagus, kerana dengan secara online sudah efisien untuk dapat

mendaftarkan masyarakat secara online dan efisien dalam biaya dan waktu dalam pendataan sensus penduduk online ini.

b. Faktor penghambat

1. Kurangnya sosialisasi

Sosialisasi diperlukan dalam proses pelaksanaan sensus penduduk secara online dalam hal ini kebijakan baru yang dikeluarkan untuk mendata penduduk diharapkan dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan sensus penduduk online. Wawancara yang dilakukan:

“Kurangnya sosialisasi yang kami lakukan sehingga membuat masih banyak masyarakat awam yang belum berpartisipasi dan masih banyaknya masyarakat juga yang belum terlalu memahami menggunakan elektronik android di kalangan masyarakat.”

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online kurang dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat awam masih banyak yang tidak tahu bahwa pada tahun ini pendataan sensus penduduk itu dilakukan secara online. Seharusnya pada saat melakukan sensus penduduk secara online harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat awam supaya masyarakat tahu dan paham langkah-langka yang dilakukan dalam peraturan sensus penduduk online tersebut.

2. Komunikasi

Komunikasi diperlukan dalam proses pelaksanaan sensus penduduk secara online dalam hal ini kebijakan baru yang dikeluarkan untuk mendata penduduk diharapkan dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan sensus penduduk online.

Wawancara yang dilakukan:

“Tidak masifnya Komunikasi yang kami lakukan sehingga membuat masih banyak masyarakat awam yang belum berpartisipasi dan masih banyaknya masyarakat juga yang belum terlalu memahami sensus penduduk online ini.”

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online tidak masifnya komunikasi yang dilakukan sehingga masyarakat awam masih banyak yang tidak tahu bahwa pada tahun ini pendataan sensus penduduk itu dilakukan secara online. Seharusnya pada saat melakukan sensus penduduk secara online komunikasi harus selalu berjalan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat memantau perkembangan sensus penduduk online.

3. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran Masyarakat diperlukan dalam proses pelaksanaan sensus penduduk secara online dalam hal ini kebijakan baru yang dikeluarkan untuk mendata penduduk diharapkan dapat memudahkan dalam proses pelaksanaan sensus penduduk online.

Wawancara yang dilakukan:

“Masih banyaknya masyarakat awam yang belum tahu betapa pentingnya pendataan sensus penduduk untuk kemajuan daerah terkhususnya di kota Makassar yang disetiap wilayah masih belum massif dalam mendaftarkan diri mereka masing-masing.”

(Hasil wawancara M, Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Kamis 03 Desember 2020 di kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)

Dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebijakan baru ini sehingga masyarakat awam masih banyak yang tidak tahu bahwa pendataan sensus penduduk ini sangat menunjang kemajuan suatu wilayah terkhususnya di kota Makassar.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar. Lebih dominan berupa kalimat berupa deskriptif yang merupakan hasil wawancara peneliti dengan informan sebagai sumber utama penelitian. Hasil wawancara yang di rekam menggunakan perekam suara (handphone). Disamping data dari hasil wawancara, peneliti juga mendapatkan data berupa dokumen dari Badan Pusat Statistik serta dokumentasi di lokasi pelaksanaan sensus penduduk secara .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, oleh karna itu pada proses pengumpulan data, peneliti juga melakukan proses analisis data yang terdiri dari 3 poin yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan.

Pertama, reduksi data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang dapat di peroleh dari hasil wawancara terhadap informan dengan

menggunakan pola pertanyaan yang sama agar diperoleh jawaban yang sesuai, untuk kemudian dilakukan penyeleksian dari jawaban agar tidak keluar dari fokus penelitian.

Kedua penyajian data yaitu peneliti melakukan pengumpulan data untuk menggambarkan kejadian dilokasi, data yang sebelumnya telah direduksi setelah data terkumpul, dalam bentuk gambar, catatan dan hasil wawancara selanjutnya dijelaskan berupa teks secara deskriptif yang telah disusun secara sistematis sehingga membantu pembaca dalam memahami hasil penelitian tersebut.

Ketiga verifikasi penarikan kesimpulan yaitu dengan menarik kesimpulan terhadap data-data dan informasi yang telah di dapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan tersebut.

Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota dapat dilihat dari teori yang di kemukakan oleh Sutarto, yaitu :

1. Sistem Registrasi

Sistem Registrasi merupakan suatu sistem yang dilaksanakan oleh petugas pemerintahan setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal (perpindahan/migrasi), dan pengangkatan anak (adopsi). Karena mencatat peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan, maka disebut juga registrasi vital dan hasilnya disebut statistik vital. Sutarto mengatakan bahwa sistem registrasi sangat penting untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penelitian diperoleh data bahwa berdasarkan tanggapan informan diatas terkait sensus penduduk secara online di kota Makassar bisa dikatakan terbilang sangat mudah bagi masyarakat karna hanya menggunakan elektronik masyarakat masing-masing yang seperti menggunakan android atau haenphone mereka dimanapun dan kapanpun selama proses pendataan masih dilaksanakan oleh badan pusat statistik dandata yang dihasilkan dalam sistem registrasi telah berjalan dengan baik alasannya karna dalam sistem ini masyarakat sangat mudah untuk mengakses dimanapun dan kapanpun dalam mendaftarkan diri mereka dalam sensus penduduk online tersebut.

Sensus penduduk online Wilayah Kota Makassar merupakan pendataan penduduk kebijakan baru dari pemerintah yang dimana dulunya dilakukan secara offline selama 6 kali dalam setiap 10 tahun. yang dimana di kota Makassar itu sendiri terdiri dari 15 kecamatan yang harus mengikuti sensus penduduk online tersebut, ditahun 2020 pertama kali pemerintah melakukan sensus penduduk secara online.

TATA CARA PENGISIAN SENSUS PENDUDUK 2020 ONLINE



1. Buka situs <https://sp2020.ssp.go.id> untuk memulai pengisian. Situs dapat diakses melalui komputer maupun smartphone yang terkoneksi dengan internet. Tampilan awal situs akan terlihat seperti gambar di atas jika melalui smartphone. Untuk tampilan yang lebih baik gunakan komputer.
2. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), masukkan Nomor KK dan centang kotak "I'm not a robot". Klik tombol Cek Kebenaran. Jika terdapat pesan **NIK dan Nomor KK Anda Tidak Sesuai** kemungkinan NIK atau No KK Anda baru atau belum terdaftar dalam data Dukcapil yang dipakai untuk Sensus Penduduk Online (SPD) 2020, solusinya adalah gunakan NIK dan No KK lama Anda untuk mengisi SPD 2020.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



3. Jika berhasil masuk akan muncul tampilan "Masukan Password". Password ini berfungsi untuk menjaga keamanan data yang Anda simpan pada SPO 2020. Isikan **PASSWORD** sesuai keinginan Anda kemudian Ulangi Password (Password Anda menjadi baik/baik). Pilih **Pertanyaan Keamanan** yang Anda sukai dan isikan **jawaban** yang hanya diketahui oleh Anda, kemudian klik **Buat Password**. Jika sudah selesai pilih bahasa Indonesia L1 OK.
4. Tampilan akan berganti menjadi **Keterangan Keluarga**. Isikan data **Alamat Keluarga Saat Ini** sesuai kondisi saat pengisian **Sensus Penduduk Online**.
5. Isikan data pada setiap pertanyaan **Keterangan Tempat Tinggal Keluarga Ini** sesuai kondisi rumah tempat tinggal Anda.
6. Pilih **Status Kepemilikan Rumah Saat Ini**, kemudian pilih **Apakah Menggunakan Listrik**.



7. Pilih **Sumber Air Minum Keluarga**, kemudian pilih **Apakah Memiliki Jamban/Tempat Buang Air Besar**.
8. Pilih **Jenis Lantai Terluas Rumah**. Jika sudah selesai klik **Simpan dan Lanjut**.
9. Tampilan akan berubah menjadi **Daftar Anggota Keluarga**. Berisi tentang nama-nama semua anggota keluarga yang masuk ke dalam **Kartu Keluarga**.

Anggota keluarga baru adalah:

- Bayi
- Orang baru yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih, memiliki alamat rumah, tinggal bersama keluarga, teman lain, dll.
- Beasiswa 1 tahun tetapi sudah pernah membantu di keluarga, memiliki alamat rumah, tinggal bersama keluarga, teman lain, dll.

Nama Anggota Keluarga

- BAMBANG
- SRI
- ANNISA

Tombol: **Simpan**, **X Batas**, **Tambah**

10. Klik **Tambah Anggota Keluarga** jika ada anggota baru dalam keluarga, seperti bayi atau keluarga lain. Isikan Nama Lengkap (atau Nama Simpan)

11. Jika sudah selesai menambahkan/mengubah daftar anggota keluarga, klik **Simpan dan Lanjut**

1. Keberadaan **KEBERADAAN**

- Ada
- Tidak Ada

2. Nomor Kartu Keluarga **0214020**

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) **3025072010000000000**

4. Jenis Kelamin **BALE**

5. Apakah alamat tempat tinggal **sekarang** sama dengan **Repele Keluarga** ya?

- Ya
- Tidak

6. Tempat Lahir **DKI JAKARTA**

Tombol: **Simpan dan Lanjut**

12. Muncul tampilan **Data Penduduk** untuk anggota keluarga yang pertama. Periksa data yang muncul dan ubah isian sesuai kondisi anggota keluarga tersebut pada saat SPO 2020. Mulai dari pertanyaan Keberadaan, Nomor KK, NIK, Jenis Kelamin, dan seterusnya. Untuk data Nomor KK dan NIK tidak dapat diubah. Mohon periksa semua isian pertanyaan, jangan sampai ada yang belum terjawab atau belum diperbarui.

13. Jika sudah diperiksa lengkap, klik **Simpan dan Lanjutkan**.

14. Periksa dan perbarui data untuk anggota keluarga yang berikutnya sampai selesai, jangan sampai ada yang terlewat.

1. Sekolah/Kuliah?
 Apakah sedang mengikuti pendidikan di Sekolah/Kuliah?
 Ya
 Tidak

2. Nomor Kartu Keluarga
 Masukkan nomor kartu keluarga yang dimiliki.
 (Opsional)

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 Masukkan nomor NIK yang dimiliki.
 (Opsional)

4. Jenis Kelamin
 Laki-laki
 Perempuan

5. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

6. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

7. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

8. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

9. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

10. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

11. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

12. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

13. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

14. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

15. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

16. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

17. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

18. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

19. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

20. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

21. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

22. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

23. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

24. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

25. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

26. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

27. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

28. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

29. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

30. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

31. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

32. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

33. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

34. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

35. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

36. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

37. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

38. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

39. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

40. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

41. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

42. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

43. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

44. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

45. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

46. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

47. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

48. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

49. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

50. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

51. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

52. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

53. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

54. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

55. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

56. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

57. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

58. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

59. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

60. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

61. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

62. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

63. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

64. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

65. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

66. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

67. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

68. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

69. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

70. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

71. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

72. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

73. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

74. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

75. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

76. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

77. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

78. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

79. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

80. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

81. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

82. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

83. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

84. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

85. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

86. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

87. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

88. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

89. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

90. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

91. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

92. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

93. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

94. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

95. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

96. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

97. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

98. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

99. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

100. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

15. Untuk anggota keluarga yang baru ditambahkan ke dalam daftar Anggota Keluarga pada tampilan sebelumnya, lengkapi data masih kosong, bukan semua data untuk anggota keluarga yang baru tersebut, mulai dari Nomor KK, NIK, dan seterusnya. Jika sudah selesai, klik **Simpan** dan **Lanjutkan**.
16. Jika semua data anggota keluarga sudah diperbarui dan diperbarui, maka tampilan akan berubah ke Ringkasan Pengisian Sensus. Dalam Ringkasan Pengisian Sensus ini akan terlihat status data mana yang sudah update dan mana yang belum update. Apabila ingin melengkapi data yang belum update, klik pada kotak **Lihat**, maka tampilan akan langsung menuju ke pertanyaan yang belum terjawab atau belum diupdate. Jika sudah klik **Simpan** dan **Lanjutkan** lagi.

17. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

18. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

19. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

20. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

21. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

22. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

23. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

24. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

25. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

26. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

27. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

28. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

29. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

30. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

31. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

32. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

33. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

34. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

35. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

36. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

37. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

38. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

39. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

40. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

41. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

42. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

43. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

44. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

45. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

46. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

47. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

48. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

49. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

50. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

51. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

52. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

53. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

54. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

55. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

56. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

57. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

58. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

59. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

60. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

61. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

62. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

63. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

64. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

65. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

66. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

67. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

68. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

69. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

70. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

71. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

72. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

73. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

74. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

75. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

76. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

77. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

78. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

79. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

80. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

81. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

82. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

83. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

84. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

85. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

86. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

87. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

88. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

89. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

90. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

91. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

92. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

93. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

94. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

95. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

96. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

97. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

98. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

99. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

100. Apakah sudah menikah?
 Ya
 Tidak

17. Jika data sudah diupdate semua, klik kotak putih pada **"Dengan ini saya menyatakan bahwa ..."**. Kemudian klik **Kirim** dan akan muncul tampilan **Terimakasih telah berpartisipasi**.
18. Klik **Unduh Bukti Pengisian** untuk mengunduh file bukti bahwa sudah mengikuti SPQ 2020. Simpan baik-baik dan tunjukkan bukti pengisian ini apabila ada petugas dari BPS yang datang mensensus ke rumah bahwa Anda sudah mengisi Sensus Penduduk secara Online.
19. Selesai. Anda sudah berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 Online.

Bantu kami #MencatatIndonesia

Table 3.1 Hasil Sensus Penduduk Online 2020

No	KECAMATAN	Jumlah Keluarga Respon	Jumlah Keluarga Clean	Jumlah Keluarga Error	Jumlah Penduduk Respon	Jumlah Penduduk Clean	Jumlah Penduduk Error
1.	MARISO	1,700	1,528	11	6,639	5,933	38
2.	MAMAJANG	1,781	1,587	17	7,448	6,543	72
3.	TAMALATE	5,099	4,575	40	21,469	19,006	172
4.	RAPPOCINI	5,382	4,722	44	22,908	19,885	192
5.	MAKASSAR	2,444	2,178	25	10,261	9,045	114
6.	UJUNG PANDANG	681	583	4	2,703	2,238	16
7.	WAJO	745	660	5	2,970	2,559	19
8.	BONTOALA	1,206	1,023	31	5,092	4,284	114
9.	UJUNG TANAH	559	497	3	2,398	2,124	9
10.	TALLO	5,279	4,961	34	22,529	21,096	144
11.	PANAKKUKANG	3,878	3,429	35	16,478	14,433	150
12.	MANGGALA	4,819	4,278	48	20,487	17,987	224
13.	BIRING KANAYA	7,963	7,035	77	33,891	29,677	350
14.	TAMALANREA	5,960	5,383	35	24,239	21,690	138
15.	SANGKARRANG	293	260	4	1,125	987	15
	Jumlah	47,789	42,192	413	200,637	177,487	1,767

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020

Berdasarkan data hasil sensus penduduk online 2020 ada 15 kecamatan yang melakukan sensus penduduk online tersebut. Dari pendaftaran online ini ada beberapa kecamatan yang pendataannya tertinggi yaitu kecamatan Biringkanaya, kecamatan yang pendataannya berada ditengah-tengah itu kecamatan Rapocini, Tamalate, dan Tamalanrea, sedangkan kecamatan yang pendataannya rendah ada di kecamatan Wajo, Ujung Pandang, dan sembilan kecamatan lainnya. Pada pendataan yang error tersebut tim dari badan pusat statistik melakukan *door to door* untuk mendapatkan data masyarakat yang error tersebut dari setiap kecamatan yang ada di kota Makassar.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kota Makassar 2020

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Mariso	30,849	30,017	60,866
2	Mamajang	30,194	31,363	61,557
3	Tamalate	104,013	105,201	209,214
4	Rappocini	82,967	88,926	171,893
5	Makassar	42,699	43,010	85,709
6	Ujung Pandang	13,796	15,423	29,219
7	Wajo	15,565	16,041	31,606
8	Bontoala	27,974	29,405	57,379
9	Ujung Tanah	18,143	17,568	35,711
10	Tallo	70,453	70,168	140,621
11	Panakkukang	74,217	75,972	150,189
12	Manggala	76,999	76,175	153,174
13	Biringkanaya	113,309	113,312	226,621
14	Tamalanrea	57,026	59,986	117,012
15	Sangkarang	7,281	7,321	14,602
	Makassar	765,485	779,888	1,545,373

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2020

Berdasarkan hasil sensus penduduk secara online 2020 maka hasil jumlah penduduk setiap kecamatan di kota Makassar di tahun 2020 ada peningkatan penduduk dari sensus penduduk 2010 jumlah penduduk sebanyak 1,4 juta penduduk. Pada sensus penduduk online 2020 jumlah penduduk meningkat sebanyak 1,5 juta penduduk di kota Makassar.

2. Prosedur Kerja

Prosedur Kerja adalah proses perencanaan penyusunan langkah-langkah kedepan yang di gunkana dalam mengatasi sensus penduduk online yang dilaksanakan di Kota Makassar. Pengecekan data untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Dalam proses ini harus melakukan banyak sosialisasi dan mengontrol setiap data yang masyarakat yang telah

melakukan sensus penduduk online.

Menurut Mulyadi (2013) dalam prosedur kerja adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang akan dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perubahan yang terjadi berulang-ulang.

Peraturan tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online diatur dalam sebuah peraturan penanggulangan bencana diatur dalam sebuah Peraturan dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut di terapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online badan pusat. Dalam mengatasi keamanan data dari sensus penduduk online. Dalam mengatasi keamanan data bukan hanya badan pusat statistik tapi yang terlibat dalam keamanan data itu sendiri ada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah, dan Ketua SLS.

Tantangan terbesar badan pusat statisitk kota Makassar dalam mengatasi kelebihan dan kekurangan dari sensus penduduk online ini baik yang dilaksanakan sekarang maupun sensus penduduk yang akan dilaksanakan kedepannya. Kekurangan itu masih banyaknya masyarakat awam yang belum berpartisipasi dan harus menggunakan elektronik android masyarakat, dan kelebihanannya itu kita jadi praktis untuk badan pusat statistik itu sendiri tidak perlu secara offline menghemat biaya dan memudahkan masyarakat juga untuk mendata diri mereka masing-masing.

Selain Kekurangan dan Kelebihan dari sensus penduduk online ini badan pusat statistik melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan sensus penduduk online kedepannya.

Badan Pusat Statistik membentuk tim dari tim tersebut disebar ke setiap kecamatan yang ada di kota Makassar dan lurah dikumpulkan untuk menyampaikan hal ini kepada RW dan RT untuk disampaikan ke masyarakat, dan memantau terus peningkatan pendataanya, membagikan brosur, dan menempel spanduk di setiap wilayah kota Makassar. Dengan adanya upaya sosialisasi dari badan pusat statistik dalam pelaksanaan sensus penduduk online ini yang masih dalam proses pendataan diharapkan berjalan dengan lancar, dan data yang dihasilkan telah berjalan dengan baik alasannya karena proses awal atau data yang diperoleh sebagai data dasar dalam pendaftaran mandiri ini badan pusat statistik bekerjasama dengan dukcapil untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi persyaratan sensus penduduk online.



Gambar 4.1 Buku Panduan dan Brosur Sensus Penduduk Online

3. Penilaian Layanan

Penilaian layanan adalah penilaian masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan sensus penduduk online ini. Setelah penilaian layanan dilakukan terhadap kebijakan baru ini maka langkah selanjutnya adalah untuk mengembangkan lagi langkah-langkah kedepannya dari saran dan kritikan masyarakat. Menurut Ralph Tyler (1950) mengatakan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pelaksanaan sensus penduduk online sudah tercapai.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sensus penduduk yang dulu dilaksanakan secara offline sekarang dilaksanakan secara online tidak adanya sosialisasi mengenai kebijakan ini, hanya mengetahuinya pada saat SLS mendatangi rumah masyarakat dan mengatakan bahwa pada tahun ini sensus penduduk dilaksanakan secara online dari SLS memberi tahu langkah-langkah pendaftaran sensus penduduk online tersebut.

Data yang dihasilkan dalam Pelayanan terhadap pelaksanaan sensus penduduk secara online ini cukup baik karena lebih efisien dan kerja sama yang nanti dilakukan Masyarakat dengan Badan pusat Statistik kota Makassar diharapkan mampu menyelesaikan pelaksanaan sensus penduduk secara online. Mengenai sensus penduduk online kedepannya itu lebih diperluas lagi sosialisasi mengenai pelaksanaannya agar masyarakat seperti kami bisa lebih awal mengetahui tentang kebijakan pemerintah, sensus penduduk secara online ini lebih ditingkatkan lagi dan terus di update perkembangannya.



Gambar 5.1 Berkas Pengisian Data Sensus Penduduk Online

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar
 - a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang penting dalam proses terwujudnya suatu pelaksanaan sensus penduduk secara online yang menjadi faktor pendukung adalah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online sudah bagus hal ini dinilai dari disediakannya link atau tautan pada browser yang terdapat di gadget masing-masing, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun untuk dapat mengakses pendaftaran sensus online tersebut.

- b. Faktor penghambat

Faktor penghambat pelaksanaan sensus penduduk online adalah suatu hal yang dapat menghambat tercapainya suatu tujuan dari pelaksanaan sensus penduduk online. Dalam hambatannya yaitu, kurangnya sosialisasi oleh pihak badan pusat statistik ke masyarakat umum mengenai kebijakan baru ini sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui tentang sensus penduduk online ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar dapat dilihat dari dijelaskan melalui tahapan yaitu :

1. Sistem Registrasi dalam pelaksanaan sensus penduduk online ini yang dilakukan oleh badan pusat statistik kota Makassar belum terlalu massif. Ada kecamatan yang masyarakatnya belum melakukan pendaftaran sensus mandiri.
2. Prosedur Kerja dalam pelaksanaan sensus penduduk online yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Makassar sudah jelas. Sesuai dengan Peraturan tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online diatur dalam sebuah peraturan penanggulangan bencana diatur dalam sebuah Peraturan dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut di terapkan UU nomor 16 tahun 1997 tentang pelaksanaan sensus penduduk secara online badan pusat. Dalam mengatasi keamanan data dari sensus penduduk online.
3. Penilaian Layanan dalam pelaksanaan sensus penduduk secara online di kota Makassar sudah cukup baik tapi dalam peraturan baru ini masih kurang dalam sosialisasinya terhadap masyarakat yang awam.

B. SARAN

Terkait dengan kesimpulan penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti :

1. Badan pusat statistik seharusnya harus memantau terus perkembangan sistem registrasi sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan pendaftaran sensus mandiri ini.
2. Dalam Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online ini Sebaiknya pihak Badan Pusat Statistik melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan Sensus Penduduk Secara Online jika terdapat kesalahan dan penyampaian syarat-syarat yang harus dilakukan masyarakat untuk mendaftar bisa diketahui dan bisa mempersiapkan berkasnya.
3. Dalam menjalankan peraturan baru pemerintah sebaiknya harus menjelaskan dengan detail dengan sosialisasi yang luas ke masyarakat awam supaya peraturan baru bisa berjalan dengan sesuai aturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Ibrahim. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Mandar Maju, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi (Ed). (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arsyad, S. A., & Nurhayati, S. (2013). *Determinan fertilitas di Indonesia*. Diperoleh dari www.Puslitbang Kependudukan BKKBN.com
- Arsyad, S. A., dkk (2014). *Determinan fertilitas (Studi pada 6 provinsi)*. Diperoleh dari www.Puslitbang Kependudukan BKKBN.com
- Aswani Zainal & Noehi Nasution. (2001). *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Atep Adya Barata. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Yudhistira.
- Djadja Saefullah. (2008). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Era Desentralisasi*. AIPI dan PK2W Lemlit Unpad. Bandung.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Hasanur, D (2016). *Pengaruh jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus di Kabupaten Kota barat selatan provinsi Aceh)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Diperoleh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/424132/MH01733.pdf>
- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lijan Poltak Sinambela. (2008). *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini. (2010). *Sistem Informasi Akutansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miftah Thoha. (1991). *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Rajawali. Jakarta.
- Miftah Thoha. (2001). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Nana Sudjana. (2001). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pandji Santosa. (2008). *Administrasi Publik Teori Good Governance*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Parubak, K. (2016). *Efektivitas sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil toraja utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online.
- Peraturan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Pratama. (2014). *Sistem Informasi dan Implementasinya*, 1st ed. Bandung: Informatika Bandung.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. (2007). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rismawati. (2018). *Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan terhadap angka kemiskinan di kabupaten Gowa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sondang P. Siagian. (2001) *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulianta. (2008). *Manajemen IT*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sutarto. (2000). *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Tata Sutabri. (2012). *Konsep Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Tyler, Ralph. (1950). *Models Of Teaching*. New Jersey: Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.



A

N

2. Bagaimana penilaian layanan menurut bapak/ibu mengenai pelaksanaan SPO di kota Makassar ?
3. Apa harapan, saran, dan kritikan bapak/ibu terhadap pelaksanaan sensus penduduk online di kota Makassar kedepannya ?





(Gambar 1: Profil Kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar)



(Gambar 2 :Proses Wawancara M. Rum Muin SEKepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat StatistikKota Makassar)

dengan judul:

"Pelaksanaan Service Penduduk Secara Online di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 November 2020 s.d 14 Januari 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, keranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih Khaerun Katoraa

[Handwritten signature]

Ketua LP3M,

[Handwritten signature]

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



12020193008874

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 8360/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : km Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Berdasarkan surat Ketua DPRD UPTSMK Makassar Nomor: 000054/III/14/2020 tanggal 11 November 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti sebagai berikut:

Nama : SUDAYANTI
Nomor Pokok : 105611113110
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (SI)
Alamat : Jl. St. Abdurrobbil No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Makassar dengan judul: **"PELAKSANAAN SENSUS PENDUDUK SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. 14 November 2020 s/d 14 Januari 2021

Selhubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini diandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dapat digunakan sebagai tanda resmi.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 12 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADINIS, S.Sos., M.S.

Pangkat : Pembina Tk.I (No : 197105011998031004)

Lampiran: 01
1. Surat Izin Penelitian Penelitian (SIPL) 01000001
2. Lembaran

00000000000000000000



Domisili No 5 Telp : (0411) 441077 Fax : (0411) 445936 Website : <http://kominfo.sulawesi.go.id>
<http://www.sspnptsp.sulawesi.go.id> Makassar 90231





**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAKASSAR**

Jl. ABU BAKR BIN HANIFALAMAH MAKASSAR TELP. 0411-442000

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 028/BPS/7371/11/30/2020

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 8360/S.01/PTSP/2020 tanggal 12 November 2020 bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : Sridayanti
 Nomor Pokok : 0561113110
 Program Studi : Ilmu Adm. Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Jln. Sil. Alauddin No 259, Makassar

benar telah melakukan pengumpulan data atau penelitian/kepuustakaan pada kantor Badan Pusat Statistik Kota Makassar, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul:

"Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online Di Kota Makassar"

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 30 November 2020

an. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KOTA MAKASSAR

Kec. BPS,

Muh. Rani Muin, SE

NIP: 196704271994011001

RIWAYAT HIDUP



SRIDAYANTI, lahir pada 01 Mei 1998 di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan. Putri kedua dari lima bersaudara dari pasangan Adam Dg. Sija dan Nurwahida.

Jenjang pendidikan penulis mulai dari Sekolah Dasar di SDI Bontojai, pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2010. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di MTSN 2 Biringkanaya pada tahun 2013, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Galesong Selatan pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2021, penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul "Pelaksanaan Sensus Penduduk Secara Online di Kota Makassar." Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan penelitian serta referensi di bidang keilmuan khususnya di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unismuh Makassar.